

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan program bantuan sosial dalam menanggulangi daerah yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Genuk Kota Semarang telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan program mampu memenuhi tujuan utama bantuan sosial, yaitu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama banjir melalui penyediaan logistik, pangan, air bersih, serta kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, pelaksanaan bantuan didukung oleh koordinasi antara Dinas Sosial, BPBD, pemerintah kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan unsur masyarakat sehingga proses pendataan, asesmen, dan penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak. Meskipun demikian, hasil evaluasi berdasarkan kriteria William N. Dunn (2017), menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi beberapa keterbatasan. Bantuan yang diberikan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat akibat dampak banjir, proses penyaluran pada beberapa jenis bantuan masih memerlukan waktu karena adanya tahapan administrasi dan verifikasi, serta masih terdapat perbedaan persepsi masyarakat mengenai pemerataan dan ketepatan penerima bantuan. Dengan demikian, pelaksanaan program bantuan sosial telah memenuhi fungsi penanganan darurat dan perlindungan bagi masyarakat terdampak banjir, namun masih memerlukan

penyempurnaan agar seluruh aspek evaluasi kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Kendala dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Kecamatan Genuk berasal dari faktor administratif, kondisi masyarakat terdampak, serta karakteristik bencana banjir yang terjadi di lapangan. Pada aspek efektivitas dan kecukupan, kendala utama terletak pada keterbatasan bantuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Pada aspek efisiensi, proses administrasi, verifikasi, asesmen, serta kondisi lapangan memengaruhi kecepatan penyaluran pada beberapa jenis bantuan. Pada aspek pemerataan dan ketepatan, masih terdapat tantangan dalam menjaga akurasi data penerima bantuan serta perbedaan persepsi masyarakat mengenai keadilan penerima bantuan. Sementara itu, pada aspek responsivitas, perubahan kebutuhan masyarakat yang berlangsung secara dinamis serta banyaknya laporan yang harus ditindaklanjuti menyebabkan pemerintah perlu terus menyesuaikan bentuk penanganan yang diberikan. Secara keseluruhan, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme penyaluran bantuan, tetapi juga oleh dinamika kondisi masyarakat dan karakteristik bencana yang terus berkembang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendataan, penguatan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan prosedur pada jenis bantuan tertentu, serta penyesuaian bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat menjadi langkah yang diperlukan agar pelaksanaan program bantuan sosial di Kecamatan Genuk dapat berjalan lebih optimal.

4.2 Saran

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan program bantuan sosial dalam menanggulangi daerah yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Genuk Kota Semarang, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial pada penanganan bencana banjir.

1. Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi pada bantuan yang bersifat stimulan atau bantuan pascabencana tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak sehingga bantuan dapat diterima sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang diperlukan. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang perlu memperkuat implementasi kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah agar pelaksanaan bantuan sosial dapat berlangsung lebih efektif.

2. Dinas Sosial dan BPBD Kota Semarang

Dinas Sosial dan BPBD Kota Semarang perlu meningkatkan kualitas pendataan masyarakat terdampak melalui pembaruan data secara berkala, verifikasi lapangan yang lebih optimal, serta penguatan integrasi data antarinstansi. Langkah tersebut penting untuk menjaga ketepatan sasaran

penerima bantuan, meminimalkan potensi kesalahan data, serta mempercepat proses penyaluran bantuan ketika bencana terjadi. Selain itu, evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan, khususnya pada bantuan yang memerlukan proses administrasi lebih panjang, perlu terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara lebih cepat tanpa mengurangi ketepatan sasaran.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pelaksanaan program bantuan sosial pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau membandingkan pelaksanaan bantuan sosial di beberapa wilayah rawan banjir. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan bantuan sosial dalam penanggulangan bencana.